



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
SINDONEWS.COM (PT. SINDONEWS PORTAL INDONESIA)
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2021**

Nomor : 800 / 86.13 / PKS-Diskominfo / IV / 2021
Nomor : 563/MOU-Pemkab LMD/04-2021/PTSPI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/462/XII/HUK-2019 tanggal 19 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SIGIT PAMUNGKAS** : Direktur CV. RAFFI RAYYAN (Sindonews.com) berkedudukan di Perum Kawi II, Jl. Samari 2 RT. 18 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa nomor 0269/SALES DAERAH-SURAT KUASA/VIII/2020 tanggal 2 Januari 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sindonews.com, Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan sindonews.com (**PT. SINDONEWS PORTAL INDONESIA**).

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal jasa publikasi, informasi pembangunan dan pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di media online Sindonews.com.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di media online Sindonews.com.
- (2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan yang ada di Kabupaten Lamandau.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



- a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Laman yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KESATU** berhak membuat iklan event-event kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
 - c. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - d. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan laman di media online sindonews.com, volume satuan 9 (Sembilan) Bulan.
 - b. Laman yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
 - c. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi laman yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan media online Sindonews.com setiap hari selama masa kontrak.
 - d. Mengunggah berita di laman yang dikontrak pada media online Sindonews.com.
 - e. Menyediakan laman untuk iklan event-event kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di media online Sindonews.com.
 - f. Membayar pajak PPN dan PPH
 - g. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 44,959,200,- (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



volume satuan 9 (sembilan) bulan, termasuk biaya periklanan serta pajak PPN dan PPH.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2021 sampai dengan 5 April 2021 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai.
 - c. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama.
 - d. Fotocopy rekening koran perusahaan.
 - e. Bukti publikasi berita;
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik Melalui Media.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank BRI atas nama CV RAFFI RAYYAN dengan nomor rekening: 0282-01-016303-53-9

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021, dan perpanjangan waktu perjanjian dapat dilakukan apabila ada kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 10

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



- 1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- 2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- 3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

BAB XI

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 11

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Pasal 12

al-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian erjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau enambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan ersetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) ang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII

PENUTUP

araf Pihak I :

araf Pihak II : /